

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Komisiner	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
N e r a c a	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan Atas Laporan Keuangan	4 - 13

**SURAT PERNYATAAN KOMISIONER
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
No.: 079/LMKN-Eksternal/V-2021**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Yurod Saleh, S.H., M.H.
Alamat Kantor	: Gedung Eks Sentra Mulia, Lt.6 Komplek Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. HR. Rasuna Said Kav X-6/8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain	: Komplek PTIK Flat A11/2 RT/RW 008/002 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Nomor telepon	: (021) - 29101017
Jabatan	: Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional;
2. Laporan keuangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang berlaku di Indonesia.
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Mei 2021

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional



Yurod Saleh, S.H., M.H.
Ketua



Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Registered Public Accounting Firm

License No. 1016/AM.1/2016

Laporan Auditor Independen

No : 00082/2.1079/AU.2/10/1060-3/1/6/2021

**Komisioner Pencipta dan Komisioner Hak Terkait
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Lembaga Manajemen Kolektif Nasional**, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, laporan Aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Registered Public Accounting Firm
License No. 1016/KM.1/2016

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Lembaga Manajemen Kolektif Nasional** tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia.

Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Tubagus Manshur, S.E., Ak., M.Si., BKP., CA., CPA
No Reg Akuntan Publik AP. 1060

Jakarta, 20 Mei 2021



LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

NERACA

31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2 0 2 0	2 0 1 9
A S E T			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4	16.679.233.918	20.398.119.578
Piutang royalti	5	14.951.227.088	9.101.133.875
Piutang lain-lain		-	903.535.949
Biaya dibayar dimuka		6.663.213	42.971.200
Pajak dibayar dimuka	10a	1.331.719.435	1.832.613.551
Jumlah aset lancar		32.968.843.654	32.278.374.251
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - bersih	6	61.977.088	31.608.985
Jumlah aset lancar		61.977.088	31.608.985
JUMLAH ASET		33.030.820.742	32.309.983.236
LIABILITAS DAN ASET BERSIH			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Kewajiban kepada pemilik hak	7	19.643.782.126	21.907.702.896
Utang lain-lain	8	14.049.718.411	9.991.446.821
Beban akrual	9	102.600.000	102.739.708
Utang pajak	10b	175.011.583	184.030.308
Jumlah liabilitas jangka pendek		33.971.112.100	32.185.920.333
ASET BERSIH			
Tidak terikat temporer		(940.291.358)	124.062.903
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH		33.030.820.742	32.309.983.236

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2 0 2 0</u>	<u>2 0 1 9</u>
PENERIMAAN DAN PENDAPATAN			
Jasa manajemen	11	7.372.098.639	7.488.867.140
Pendapatan bunga bank dan jasa giro		396.950.506	544.361.892
Pendapatan lainnya		-	369.460.013
Jumlah pendapatan dan penerimaan		<u>7.769.049.145</u>	<u>8.402.789.045</u>
BEBAN			
Beban langsung	12	2.640.108.135	910.656.000
Beban operasional	13	6.066.267.351	5.711.861.212
Biaya meterai dan administrasi bank		80.026.516	106.788.634
Beban Lainnya		<u>47.001.404</u>	<u>34.524.827</u>
Jumlah beban		<u>8.833.403.406</u>	<u>6.763.630.673</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH SEBELUM PAJAK		<u>(1.064.354.261)</u>	<u>1.639.158.372</u>
BEBAN (MANFAAT) PAJAK			
Pajak kini	10c	-	53.852.979
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH		<u>(1.064.354.261)</u>	<u>1.585.305.393</u>
ASET BERSIH AWAL TAHUN		<u>124.062.903</u>	<u>(1.461.242.480)</u>
ASET BERSIH AKHIR TAHUN		<u>(940.291.358)</u>	<u>124.062.903</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan royalti	1.527.005.628	11.367.097.590
Pembayaran kepada pemilik hak dan pihak ketiga	(7.691.694.465)	(5.290.414.385)
Pembayaran kepada pengurus dan karyawan	(3.599.309.126)	(3.137.030.002)
Penerimaan bunga bank dan jasa giro	386.950.006	913.821.305
Pembayaran pajak	528.152.755	(1.535.552.081)
Penerimaan (pembayaran) lain-lain	498.607.630	3.389.616.942
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	(3.672.057.264)	5.705.732.385
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(48.328.394)	(31.003.268)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(48.328.394)	(31.003.268,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(3.718.885.658)	5.675.729.117
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	20.398.119.576	14.722.390.459
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	16.679.233.918	20.398.119.576

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah sebuah Lembaga Negara Bantu Eksekutif Non APBN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014, untuk mewakili pemilik isersi atas hak cipta dan atau produk hak terkait, dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dan pengguna yang bersifat komersial kepada pemilik lisensi tersebut. Atas kegiatan tersebut LMKN mendapatkan imbalan berupa jasa manajemen.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang efektif berlaku sejak 16 Oktober 2014, mengatur tentang pemberian lisensi atas Hak Cipta dan atau Produk Hak Terkait kepada pengguna yang bersifat komersial dan pemberian royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi satu ciptaan atau produk hak terkait tersebut.

Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta adalah Lembaga Manajemen Kolektif yang mengelola hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk kepentingan komersial.

Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait adalah Lembaga Manajemen Kolektif yang mengelola hak-hak yang dimiliki oleh Produser Fonogram dan Performer untuk kepentingan komersial.

Petunjuk teknis pelaksanaan proses pengeloaan royalti oleh LMKN diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-04 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan Dan Pendistribusian Royalti Lagu Dan Musik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Rumah Bernyanyi.

Anggaran dasar LMKN telah mengalami perubahan-perubahan, terakhir dengan akta No.4 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Ny. Sasthani Josoprawiro SH., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AH-27878.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 24 Mei 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 13 September 2013 Tambahan No 101327/2013.

LMKN berkedudukan di Gedung Kementerian Hukum dan HAM RI (Eks. Sentra Mula) lantai E, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-8/8, Jakarta Selatan 12940

b. Susunan Komisisioner

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-01.KI.01.08 TAHUN 2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penetapan Komisisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait Di Bidang Lagu Dan/Musik, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menetapkan susunan komisisioner LMKN untuk tahun 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Brigjen Pol (P) Yurad Saleh SH., MH
Wakil Ketua	: Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
Anggota	
A. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat:	: Ir James Freddy Surdah (Pencipta) Raphi Mudiardjo Kawradji SH., ACCS., S.Kom., CIP., CPL (Hak Terkait)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Susunan Komisiner (lanjutan)

B. Bidang Hukum dan Litigasi	Marulani Junliani Hutauruk SH (Pencipta) Rien Ulhami Dewi SH (Hak Terkait)
C. Bidang Teknologi Informasi dan Database Musik	Ebiek G Ade (Pencipta) Irfan Aulia S Kgm (Hak Terkait)
D. Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi	Adi Adrian (Pencipta) Yessi Kurniawan ST (Hak Terkait)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING

Kebijakan akuntansi dan pelaporan LMKN sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia. Prinsip akuntansi signifikan yang diterapkan secara konsisten di dalam penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut

a. Pernyataan Kepatuhan

Komisiner bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK).

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Dasar pengukuran dalam penyajian laporan keuangan adalah biaya perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam akun terkait. Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disajikan dengan menggunakan dasar akuntansi akrual.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Untuk tujuan pelaporan arus kas, deposito berjangka yang jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan tidak dimasukkan sebagai setara kas. Kas terdiri atas kas tunai dan kas di bank.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan adalah Indonesia Rupiah (IDR). Jika tidak dinyatakan lain, semua angka yang disajikan dalam laporan keuangan adalah Rupiah penuh.

c. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijaminakan serta tidak dibatasi pencairannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

d. Piutang Royalti

Piutang royalti disajikan sebesar jumlah neto royalti yang dilagihkan kepada pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait.

e. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar di muka diamortisas selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian jangka panjang biaya dibayar di muka disajikan sebagai aset tidak lancar.

f. Aset Bersih Terikat Temporer

Neraca menyajikan masing-masing kelompok aset bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembalasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Pembatasan permanen terhadap (1) aset, seperti tanah atau karya seni, yang disumbangkan untuk tujuan tertentu untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau (2) aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi (*endowment*).

Pembatasan temporer terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, (2) investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau (4) pemerolehan aset tetap, dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu atau pembalasan penggunaan, atau keduanya.

Aset bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akte pendirian, dan dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Kewajiban Kepada Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait

Disajikan sebesar royalti siap distribusi (*distributable royalty*) kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan manajemen diakui berdasarkan persentase tertentu dari nilai tagihan ke pemakai hak. Besaran persentase tersebut ditetapkan melalui ketentuan dan/atau peraturan dan/atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu dan tingkat bunga bank yang berlaku sedangkan pendapatan lainnya diakui atas dasar akrual.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Beban diakui pada saat terjadinya dan sesuai dengan masa manfaatnya (*accrual basis*). Beban ditangguhkan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Beban bunga diakui atas dasar proporsional waktu dan lingkup bunga yang berlaku.

i. Perpajakan

LMKN mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, LMKN harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. LMKN tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

j. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 "Ketenagakerjaan" tanggal 25 Maret 2003, diluar program Pensiun Manfaat Pasti, LMKN berkewajiban memberikan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti rugi kepada karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PHK tersebut meliputi berhenti karena memasuki usia pensiun, meninggal dunia dan mengundurkan diri secara hormat. Besarnya kompensasi PHK ditentukan oleh sebab terjadinya PHK, jumlah masa kerja dan besarnya penghasilan tetap yang diterima karyawan pada bulan terakhir. Pada tahun 2020 dan 2019 LMKN belum membukukan kewajiban imbalan pasca kerja karena belum memiliki karyawan tetap.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK-ETAP mewajibkan LMKN untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan berhubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Estimasi dan asumsi

LMKN mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali LMKN. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan terhadap adanya penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode pelaporan berikutnya, diungkapkan di bawah ini.

Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan penyisihan modal dan beban yang dapat dikurangkan dalam mengestimasi provisi pajak penghasilan LMKN.

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI (Lanjutan)

Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan (lanjutan)

Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan LMKN melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang pajaknya tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") atau Auditor Pemerintah. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi dari posisi pajak LMKN dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasilnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini bergantung pada estimasi produksi, volume penjualan barang atau jasa, harga komoditas, cadangan, biaya operasi, belanja modal dan transaksi manajemen lainnya di masa depan.

4. KAS DAN SETARA KAS

	2020	2019
Kas		
Rupiah	728.085	13.521.459
Bank		
Rekening giro - Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.673.505.823	20.384.588.087
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.900.000	-
Jumlah bank	16.678.505.823	20.384.588.087
Jumlah kas dan setara kas	16.679.233.918	20.398.119.576

Seluruh saldo bank milik LMKN ditempatkan pada bank BUMN dan tidak dibatasi penggunaannya.

5. PIUTANG ROYALTI

	2020	2019
PT Indomarco PrismaTama	1.186.813.372	1.186.813.072
PT Cakrawala Andalas Televisi	1.144.947.490	1.144.947.490
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk	1.118.546.247	-
PT Cakrawala Andalas Televisi	870.638.288	-
PT Media Nusantara Citra Tbk	813.966.666	-
Persek Wahana Musik Indonesia	662.659.758	120.000.000
PT Net Medialama Televisi	417.758.687	152.049.521
PT Imperium Happy Puppy	378.430.200	378.430.200
PT Julia Visual Nusantara Tivi Tuluuh	338.095.066	-
Ditambahkan	6.932.855.494	2.982.240.283

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam rupiah peruh kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG ROYALTI

	2020	2019
Pincahan	8.832.855.494	2.982.240.283
PT Delamibrands Kharisma Busana	328.950.805	328.950.805
PT Vizta Mitra Indonesia	252.240.000	252.240.000
PT Putra Agung I estan	220.006.224	-
PT Kilornette Leslan	177.834.000	-
PT Putera Mataram Mitra Sejahtera	175.534.750	175.484.790
PT Mitra Suarasejati	167.655.150	160.383.150
Venus Karaoke	167.169.350	167.169.350
PT Media Televisi Indonesia	162.215.157	-
PT Latvi Media Karya	154.978.788	-
CV Limas Hotel	152.773.200	152.773.200
P ^{te} Sari Coffee Indonesia	150.502.002	-
PT Bakti Jaya Perkasa	132.598.800	140.580.000
PT Lima Pilar Jaya Abadi	127.089.600	127.089.600
CV Selebriti	123.750.000	-
PT Tumbuh Sehat Makmur	104.658.000	104.658.000
PT Duta Neda Mas Prima	102.409.200	102.409.200
Lain-lain (dibawah Rp1.000.000,00)	5.318.068.520	4.407.155.597
Jumlah piutang royalti	14.951.227.068	9.101.133.975

Merupakan saldo tagihan kepada pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait

6. ASET TETAP

	2020		
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan
Harga Perolehan :			
Peralatan kantor	35.727.466	45.828.394	-
Akumulasi Penyusutan :			
Peralatan kantor	4.118.481	16.460.291	-
Nilai Buku	31.608.985		61.977.088
	2019		
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan
Harga Perolehan :			
Peralatan kantor	4.724.198	31.003.268	-
Akumulasi Penyusutan :			
Peralatan kantor	452.796	3.635.685	-
Nilai Buku	4.271.402		31.608.985

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain);

7. KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG DAN PEMILIK HAK

	2020	2019
PT Wahana Musik Indonesia	4.955.099.713	-
Royalti	4.610.598.264	15.017.239.977
Sentra Lisensi Musik Indonesia	2.536.568.914	3.232.488.457
Karya Cipta Indonesia	2.415.362.281	81.138.957
Anugrah Royalti Dangdut Indonesia	1.931.865.745	560.729.231
Unclaimed	1.454.565.356	1.454.565.356
Hak Pencipta	728.292.937	1.561.540.916
Royal Anugrah Indonesia	594.813.628	-
Amindo	480.357.286	-
Wvr Family	36.270.000	-
Jumlah kewajiban kepada pemilik hak	19.643.782.126	21.907.702.896

8. UTANG LAIN-LAIN

	2020	2019
Hak yang belum di tentukan (<i>Unidentified</i>)	11.943.195.800	7.951.174.818
Hak pencipta	1.328.687.258	1.328.687.258
PT Royalti Anugrah Indonesia	215.251.465	215.251.465
PT Wahana Musik Indonesia	150.000.000	150.000.000
PT AS Industri Rekaman Indonesia	150.000.000	150.000.000
Karyawan	6.737.160	6.737.160
Lain-lain	255.546.728	139.596.120
Jumlah utang lain-lain	14.049.718.411	9.991.446.821

Utang lain-lain kepada PT Royalti Anugrah Indonesia, PT Wahana Musik Indonesia dan PT AS Industri Rekaman Indonesia, merupakan sisa utang atas pinjaman yang diterima Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pada saat mulai beroperasi yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Lembaga. Pinjaman tersebut diterima tanpa dikenakan bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang tetap.

9. BEBAN AKRUAL

	2020	2019
Jasa profesional	102.000.000	65.000.000
Gaji	500.000	30.600.000
Transportasi	-	7.139.708
Jumlah beban akrual	102.600.000	102.739.708

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

10. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	2020	2019
Pajak Pertambahan Nilai	1.331.719.435	1.832.613.551
Jumlah pajak dibayar dimuka	1.331.719.435	1.832.613.551

b. Utang pajak

	2020	2019
Pajak Penghasilan Pasal 21	61.114.115	135.809.885
Pajak Penghasilan Pasal 29	48.221.023	48.221.023
Jumlah utang pajak	109.335.138	184.030.908

c. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih sebelum pajak menurut laporan aktivitas dengan taksiran laba (rugi) menurut pajak adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Kenaikan (penurunan) aset bersih sebelum pajak menurut laporan aktivitas	(1.064.354.281)	1.639.158.372
Perbedaan fiskal terdiri:		
Perbedaan sementara	-	-
Perbedaan tetap:		
Pendapatan jasa giro	(396.950.498)	(544.361.892)
Beban pajak	419.306.430	516.515.659
Biaya lainnya yang tidak dapat dikurangkan	363.329.151	112.928.685
Jumlah perbedaan fiskal	385.685.083	85.082.452
Taksiran penghasilan neto - fiskal	(678.669.178)	1.724.240.824
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya	-	(1.407.238.784)
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	(678.669.000)	317.002.000
Taksiran pajak penghasilan	-	53.852.979
Dikurangi pajak dibayar dimuka:		
Pajak penghasilan pasal 23	-	5.631.958
Utang pajak penghasilan pasal 29	-	48.221.023,00

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

11. PENDAPATAN

	2020	2019
Jasa manajemen royalti:		
Digital	4.522.164.667	1.852.733.468
Televisi	757.534.231	665.402.246
Mal	710.598.815	560.016.910
Karaoke	679.889.500	3.777.341.082
Restoran	345.524.612	164.181.000
Hotel	343.833.324	417.632.333
Executive	9.750.000	34.740.000
Diskotik	1.204.000	10.804.000
Radio	800.000	400.001
Rekreasi	799.500	4.422.600
Transportasi	-	1.012.500
Pameran	-	300.000
Jumlah pendapatan	7.372.098.639	7.488.967.140

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, pada pasal 18 dijelaskan bahwa LMKN dapat menggunakan cara operasional paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan.

12. BIAYA OPERASIONAL

	2020	2019
Gaji dan tunjangan	3.399.309.128	3.137.838.002
Perjalanan dinas	881.587.342	532.313.135
Pajak	419.306.430	409.727.025
Transportasi	387.770.605	338.527.241
Asuransi	202.055.436	-
Jasa profesional	145.125.000	238.900.000
Perangkat lunak	120.586.999	36.605.500
Operasional komisioner lama	112.500.000	-
Sosialisasi dan pelatihan	107.336.438	155.419.200
Rumah tangga kantor	78.111.271	111.184.721
Kepertuan kantor dan ATK	75.409.492	46.590.404
BPJS	61.623.899	21.459.620
Pengiriman dokumen	48.278.500	48.088.000
Penyusutan	18.460.291	3.665.665
Sewa	9.056.320	188.323.360
Pertalkan dan pemeliharaan	5.702.700	22.091.100
Lisensi	3.000.000	399.411.150
Pendidikan dan pelatihan	2.650.000	-
Entertain dan jamuan	-	21.106.069
Lain-lain	317.500	413.000
Jumlah beban operasional	6.066.267.351	5.711.661.212

13. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan terlampir adalah tanggung jawab Komisiner LMKN dan telah disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2021.

